

LITERATURE REVIEW : PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Putri Sonia, Susilawati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Sumatera Utara, Medan

Email : Putrisonia022@gmail.com, susilawati@uinsu.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima
23 Juni 2022
Direvisi
12 Juli 2022
Disetujui
23 Juli 2022

Kata kunci:

Pemberdayaan, Pemerintah,
Pesisir, Nelayan.

ABSTRAK

Pemberdayaan pada masyarakat pesisir sangat memerlukan keterlibatan yang kuat dari pihak pemerintah daerah untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir. Metode Penelitian ini adalah Literature Review dengan menggunakan metode metode naratif dengan mengelompokkan, mengumpulkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan dari Analisa Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan literature review ini melalui Website Jurnal Nasional seperti Google Scholar. Kesimpulan dari hasil Literaturre review menjelaskan bahwa pada 3 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan kesehatan pada masyarakat pesisir masih kurang optimal di karenakan masih ada masyarakat yang belum memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah, masyarakat kecewa karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka, dan kurangnya anggaran untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut.

Keywords :

*Empowerment,
Government, Coastal,
Fishermen.*

ABSTRACT

Empowerment of coastal communities really requires strong involvement from the local government to provide opportunities and ensure the sustainability of the various results achieved. The purpose of this study was to determine the role of the government in improving the empowerment of coastal communities. This research method is a Literature Review using narrative methods by grouping, collecting data from similar extraction results according to the measured results to answer the objectives of the analysis of the Government's Role in Improving the Empowerment of

Coastal Communities. The source of the literature used in the preparation of this literature review is through the National Journal Website such as Google Scholar. The conclusion from the results of the Literature review explains that in the 3 journals it can be concluded that the government's role in improving health empowerment in coastal communities is still not optimal because there are still people who have not received empowerment programs from the government, people are disappointed because their needs are not met according to their wishes. , and the lack of budget to run the empowerment program.

Pendahuluan

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah seperangkat perilaku yang harus dimiliki oleh mereka yang menghuni suatu masyarakat (Wulandari et al., 2018). Jika seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memainkan peran itu, baik sebagai pekerja maupun sebagai masyarakat. Pemerintah merupakan salah satu unsur bangsa yang memegang peranan penting dan bertanggung jawab dalam mengatur roda pemerintahan untuk mencapai tujuan bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya (Ridwansyah, 2018).

Peran pemerintah daerah diposisikan untuk memberikan kegiatan pengelolaan yang memberikan informasi, pengetahuan dan edukasi tentang pengelolaan perusahaan perikanan. Sistem yang diharapkan adalah mendorong modal sosial nelayan dan memberi mereka lebih banyak kekuatan sosial dalam ekonomi yang mandiri. Bimbingan dan pelatihan diperlukan karena pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan komunitas nelayan yang lebih mandiri.

Menurut (Mubarak, 2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk bertindak sesuai dengan martabatnya sendiri untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ada lima prinsip utama untuk mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut (Prayitno & dan Informasi, 2013) yaitu Pendekatan bottom-up, partisipasi, konsep berkelanjutan, integrasi, manfaat dan sosial ekonomi.

Implementasi program pemberdayaan adalah sesuatu sangat diperlukan untuk kerjasama antara beberapa pihak yaitu Pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (Suhendi, 2013). Kerjasama yang harmonis dan seimbang dan saling menguntungkan akan mampu menjaga kelestarian dan keberlanjutan sebuah program pembangunan untuk kemakmuran (Arida & Sunarta, 2017). Pada masyarakat dapat berhasil diimplementasikan dengan kerja sama antara berbagai pihak

untuk melaksanakan rencana pengembangan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak bekerja dengan baik tanpa kerjasama antar pemerintah (Haris, 2014). Dalam membangun masyarakat yang optimal, pemerintah memiliki fungsi dan peran antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator, yaitu mengatur arah terselenggaranya pembangunan yang berimbang melalui regulasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengawasi semua kegiatan implementasi yang memungkinkan.
2. Pemerintah sebagai dinamisator, yaitu mendorong partisipasi masyarakat ketika ditemui kendala dalam proses pembangunan, guna mendorong dan menjaga momentum pembangunan daerah. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan bimbingan dan bimbingan yang mendalam dan efektif kepada masyarakat, biasanya melalui tim penyuluh atau melalui pelatihan yang diberikan oleh lembaga tertentu.
3. Peran pemerintah sebagai fasilitator, yaitu menciptakan kondisi untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan sehingga dapat menjembatani kepentingan semua pihak di masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
4. Sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pembinaan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, dan di bidang pendanaan atau pendanaan dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat terkait.

Secara teori, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang hidup dan melakukan kegiatan sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya pesisir dan laut . Masyarakat pesisir adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lain yang mata pencaharian sosial ekonominya bergantung pada sumber daya laut (Sabarisman, 2017). Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik sumber daya alam yang mereka temui. Sumber daya alam yang dihadapi masyarakat pesisir dapat dikelola, mobilitas usaha relatif rendah, dan faktor risiko tidak terlalu besar. Menurut (As, 2017), dalam pemberdayaan masyarakat nelayan perlu diberikan kebutuhan yang bersifat mendesak, bukan upaya pemecahan masalah, tetapi hanya bantuan sementara. Pemberdayaan membutuhkan sedikit teknologi karena pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah perubahan sosial, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan iklim sosial budaya dan sosial ekonomi yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Metode

Penelitian ini adalah Literature Review dengan menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan, mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan dari Analisa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Fatin, 2017). Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan literature review ini melalui Website Jurnal Nasional seperti Google Scholar dengan kata

kunci : Pemerintah, Pemberdayaan, Pesisir, Nelayan. Jurnal yang digunakan ditelaah sesuai kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan ([Windasai et al., 2021](#)) dengan judul peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dasar penelitiannya adalah observasi dan wawancara yakni penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin variable-variabel yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Hasil Penelitian ini berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu menyelenggarakan penangkapan ikan program pemberdayaan masyarakat seperti, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sarana dan infrastruktur dan pemebentukan kelembagaan nelayan. Namun, dalam komunitas masih ada beberapa kendala seperti, kurangnya sumber daya manusia di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, anggaran yang terbatas, kurangnya teknologi dan transportasi yang memadai. Hal inilah yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan penelitian ([Paparang et al., 2017](#)) mengungkapkan hasil pnelitiain ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore belumlah optimal. Kemudian dalam penelitian ([Tuasamu, 2019](#)) diperoleh hasil bahwa dalam perencanaan orientasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan sudah sering dilakukan hingga semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini kelompok nelayan sudah dituangkan kedalam proposal yang diajukan kepada Dinas Perikanan. Tingkat kebutuhan masyarakat nelayan. Hingga saat ini masyarakat nelayan belum mendapatkan bantuan apapun dari dinas perikanan yang mana bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan tarap hidup mereka. Evaluasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan. Melihat semua hal tersebut masyarakat sangat kecewa dikarenakan kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka. Menurut ([Bhinadi, 2017](#)) Pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan keterlibatan yang kuat dari aparat dan pihak pemerintah daerah untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pada penelitian pertama, dapat dihasilkan bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenep khususnya di bidang perikanan tidak sepenuhnya maksimal dalam segi pemberdayaan. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu yang pertama, pengembangan sumber daya manusia, dimana dalam hal pengembangan sumber daya manusia pemerintah melalui pemberian pelatihan dan pembinaan, untuk Kepulauan Masalembu dalam hal pemberian pelatihan dan pembinaan masih belum terealisasi. Kedua, pengembangan sarana dan prasarana, dalam hal ini pemerintah melalui pemberian bantuan, dalam pemberian bantuan, masyarakat terlebih dahulu mengajukan proposal. Ketiga pembentukan kelembagaan nelayan, dimana kelembagaan tersebut menjadi wadah

bagi masyarakat nelayan dan mempermudah pemerintah dalam mengkoordiner masyarakat nelayan.

Kendala dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu, pertama kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumemep, sehingga terdapat program yang masih tidak terealisasi di Kepulauan Masalembu. Kedua, terbatasnya anggaran yang diberikan menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah dirancang. Ketiga, kurangnya teknologi. Di Kepulauan Masalembu untuk teknologi masih sangat minim, seperti halnya jaringan internet yang masih tidak ada, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu. Keempat, yaitu Transportasi. Letak geografis Kepulauan Masalembu yang terbilang lumayan jauh dari Kabupaten Sumenep menjadi kendala dimana transportasi yang digunakan menggunakan transportasi laut yang memakan waktu kurang lebih 14 jam dan untuk transportasi kapal yang tidak setiap hari ada, hal ini juga menjadi kendala pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kepulauan Masalembu. Hal inilah yang menyebabkan pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi kurang optimal.

Pada penelitian kedua, dapat dihasilkan bahwa dalam menjalankan program pemberdayaan bagi masyarakat di Kecamatan Marore, tentunya tidak akan berhasil jika program tersebut hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja tentunya harus dilaksanakan secara bersama-sama baik itu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat namun dalam pelaksanaan program tersebut haruslah ada keterpaduan antara program pemberdayaan yang dianggarkan melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah) Kabupaten Kepulauan sangihe, APBD Provinsi Sulawesi Utara maupun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Pemerintah Republik Indonesia. Keterpaduan yang dimaksud adanya hubungan saling melengkapi antara program Daerah, Provinsi dan Pusat. Program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Kepulauan sangihe memiliki konsep keberlanjutan dimana program yang diselenggarakan bertahap atau memiliki konsep yang terus berkembang dari tahun ke tahun sampai target masyarakat terberdayakan akan tercapai, selain itu pula sebagian besar program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sangihe terintegrasi/terpadu dengan program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Pusat.

Tujuan utama dari program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah adalah masyarakat yang mampu dan mandiri dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari informan yaitu masyarakat Marore yang menerima program dari pemerintah yang mengatakan memang ada peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan namun *outcome* yang di dapatkan belumlah maksimal karena masih ada masyarakat penerima program pemberdayaan yang hidup di bawah garis kemiskinan selain itu masih ada program yang belum terlalu tepat sasaran.

Peran pemerintah daerah dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Marore kabupaten Kepulauan sangihe sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina sudah cukup baik hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam program pemberdayaan yang dilakukan sebagai salah satu contohnya adalah pembentukan kelompok-kelompok nelayan yang diberikan bantuan alat tangkap dan edukasi berupa pelatihan-pelatihan khusus dalam penangkapan maupun pengolahan hasil laut, namun peran yang di jalankan oleh pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan sangihe belumlah optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan dan keseriusan masyarakat dalam menyambut program pemberdayaan yang dimaksud. itu dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang semestinya memperoleh program pemberdayaan namun belum memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah daerah.

Pada penelitian ketiga, dapat di hasilkan bahwa terkait dengan Perencanaan Orientasi Sasaran Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (nelayan) sudah dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah guna mengetahui keinginan dari para nelayan terkait apa-apa saja yang sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua kalangan, yaitu kepala dusun, sekertaris dusun, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga kelompok-kelompok.

Pada tingkat kebutuhan masyarakat nelayan, para nelayan tradisional di Dusun Mamua berusaha untuk menyeimbangkan pendapatan yang dihasilkan dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk keperluan mereka sehari-hari. Jika mereka tidak pandai dalam mengatur keuangan, maka kebutuhan ekonomi nelayan tidak akan terpenuhi dan akan tetap berada pada garis kemiskinan. Kebutuhan masyarakat (nelayan) saat ini sangat tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, dan pemberian tersebut juga terkecuali adanya pilkada baru masyarakat bisa mendapatkan bantuan, sampai sekarang pun masyarakat tidak pernah mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan mereka dari dinas perikanan dikarenakan semua proposal yang diajukan mungkin saja tidak dihiraukan makanya sampai sekarang pun bantuan tidak pernah ada buat masyarakat (nelayan) yang ada didusun mamua (Silooy, 2017).

Evaluasi orientasi sasaran pemberdayaan masyarakat Nelayan di Dusun Mamua terlihat bahwa tidak adanya bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal ini nelayan yang membutuhkan bantuan berupa perahu, dan mesin yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat nelayan yang ada di Dusun Mamua dikarenakan semua proposal-proposal yang diajukan kepada dinas perikanan guna memenuhi semua kebutuhan nelayan tidak dihiraukan.

Dari penjelasan ketiga jurnal tersebut diperoleh bahwa tingkat pemberdayaan yang dilakukan pemerintah belum optimal.

1. Pada Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep kendala dalam pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu, pertama kurangnya sumberdaya manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten sumenep, sehingga terdapat program yang masih tidak terealisasi di Kepulauan Masalembu. Kedua, terbatasnya anggaran yang diberikan menjadi kendala dalam menjalankan program-program yang telah dirancang. Ketiga,

kurangnya teknologi dan Keempat, Transportasi dimana transportasi yang digunakan masih transportasi laut.

2. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe tingkat keberhasilan dari program-program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah cukup tinggi terhadap masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Marore dimana masyarakat dalam menangkap bahkan mengelola hasil laut sangat baik yang tentunya berdampak pada keuntungan secara social maupun secara ekonomi. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari informan bahwa masyarakat marore yang menerima program dari pemerintah yang mengatakan memang ada peningkatan taraf hidup masyarakat yang menjadi objek pemberdayaan namun outcome yang di dapatkan belumlah maksimal dikarenakan masih ada masyarakat penerima program pemberdayaan yang hidup di bawah garis kemiskinan selain itu masih ada program yang belum terlalu tepat sasaran.
3. Di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu Hingga saat ini masyarakat nelayan belum mendapatkan bantuan apapun dari dinas perikanan yang mana bantuan yang diharapkan dapat meningkatkan tarap hidup mereka. Evaluasi sasaran pemberdayaan masyarakat nelayan melihat semua hal tersebut masyarakat sangat kecewa dikarenakan kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka.

Kesimpulan

Dari hasil analisis tiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan kesehatan pada masyarakat pesisir masih kurang optimal di karenakan masih ada masyarakat yang belum memperoleh program pemberdayaan dari pemerintah, masyarakat kecewa karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan mereka, dan kurangnya anggaran untuk menjalankan program pemberdayaan tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Arida, N. S. N. S., & Sunarta, N. (2017). *Pariwisata berkelanjutan*. Bali: Cakra Press. [Google Scholar](#)
- As, Z. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122. [Google Scholar](#)
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish. [Google Scholar](#)
- Fatin, N. (2017). Pengertian Studi Literatur. Daring]. Tersedia Pada: [Http://Seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/Pengertian-Studi-Literatur.html](http://Seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/Pengertian-Studi-Literatur.html). [Diakses: 16 April 2020]. [Google Scholar](#)
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter*, 13(2). [Google Scholar](#)
- Mubarak, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Universitas Diponegoro. [Google Scholar](#)
- Paparang, B. R., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kawasan Perbatasan (Suatu Studi Di Kecamatan Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Prayitno, U. S., & dan Informasi, P. P. P. D. (2013). *Pemberdayaan masyarakat*. P3DI Setjen DPR, Republik Indonesia dan Azza Grafika. [Google Scholar](#)
- Ridwansyah, M. (2018). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838–858. [Google Scholar](#)
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3(3). [Google Scholar](#)
- Silooy, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Absolut Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Desa Seilale Kecamatan Nusaniwe. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 79–84. [Google Scholar](#)
- Suhendi, A. (2013). Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(2). [Google Scholar](#)
- Tuasamu, F. D. (2019). Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Nelayan) Di Dusun Mamua Desa Hilla Kecamatan Leihitu. *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 140–151. [Google Scholar](#)
- Windasai, W., Said, M. M., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793–804. [Google Scholar](#)
- Wulandari, D. A., Falihin, D., & Zulfadli, M. (2018). Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Mattojang Di Desa Katteong Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

Copyright holder :

Putri Sonia, Susilawati (2022)

First publication right :

Jurnal Syntax Admiration

This article is licensed under:

